



**ANALISIS DAMPAK EKONOMI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI
KECAMATAN UNGAR KABUPATEN KARIMUN**

Nur Nadila Widiansa¹, Fitri Kurnianingsih², Okparizan³

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji. Jalan Raya Dompok, Kota Tanjungpinang,
Kepulauan Riau.

Email: 180563201010@students.umrah.ac.id, fitrikurnianingsih@umrah.ac.id,
okparizan@yahoo.com

Artikelinfo

Artikel history:

Diterima: 9 Mei 2022
Diterima dalam bentuk
revisi: 23 Juni 2022
Diterbitkan: 12 Juli 2022

Kata Kunci: Analisis
Dampak, Ekonomi,
Program Keluarga
Harapan.

Abstrak

Kemiskinan merupakan salah satu fenomena global yang sangat memprihatinkan bagi negara berkembang terutama negara Indonesia. Salah satu upaya mempercepat penanggulangannya ialah Program Keluarga Harapan yang merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dampak dan faktor penghambat ekonomi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, serta pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Dampak Ekonomi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ungar belum terdapat perubahan yang maksimal walaupun berdampak positif bagi penerima dalam membantu meringankan kebutuhan hidup dan mengurangi beban. Namun program PKH mampu membuat perubahan perekonomian yang maju terbukti dengan 17 penerima yang mengalami perubahan sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan sedangkan 154 penerima masih dalam kondisi perbaikan ekonomi. Program ini berdampak negatif yaitu masyarakat masih ada yang ketergantungan bantuan. Faktor penghambatnya ialah terdapat data yang belum akurat/tidak tepat sasaran dikarenakan masih terdapat masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan pemerintah.

Corresponden author: Nur Nadila Widiansa

Email: 180563201010@students.umrah.ac.id

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

² Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

³ Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

Pendahuluan

Kemiskinan menggambarkan salah satu fenomena global dan menjadi perhatian besar bagi hampir di seluruh negara berkembang apalagi di negara berpenduduk padat yaitu Negara Indonesia. Pada Maret tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 27,54 juta orang namun pada September 2021 jumlah penduduk sebanyak 26,50 juta orang, artinya jumlah penduduk menurun 1,04 juta orang dari Maret-September 2021. Sebagai negara berkembang Indonesia tidak lepas dari permasalahan kemiskinan. Permasalahan kemiskinan ini perlu ditanggulangi secara serius oleh pemerintah Negara Indonesia. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan dan masalah ekonomi. Keadaan ketidakmampuan ini ditandai atas rendahnya kesanggupan dalam memperoleh penghasilan demi mencukupi keperluan dasar berupa sandang, pangan, serta papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak pada berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Oleh sebab itu, program pengentasan kemiskinan akan terus ditingkatkan untuk menurunkan angka kemiskinan.

Hal ini dibuktikan dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (dasar hukum utama dalam bidang peraturan perundang-undangan) Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Dengan begitu, jelas bahwa pemerintah wajib merawat fakir miskin dan anak-anak terlantar dengan sistem jaminan sosial dan fasilitas umum yang layak.

Selama ini telah banyak program-program pemerintah yang telah dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan, tetapi tidak dapat disangkal bahwa upaya sering gagal. Pemerintah telah menyadari pentingnya masalah ini dan telah melakukan segala kemungkinan untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh kemiskinan. Upaya pemerintah adalah mengeluarkan kebijakan terkait dengan bantuan sosial dan pemberdayaan keluarga miskin. Salah satu kebijakan pemerintah dalam hal ini dilaksanakan melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan atau biasa disebut PKH merupakan Program bantuan sosial bersyarat untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang dikenal sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH. PKH adalah program yang dibuat untuk mempercepat proses pengentasan kemiskinan sejak pemerintah Indonesia memperkenalkan program keluarga harapan pada tahun 2007. PKH juga merupakan program perlindungan sosial, yang juga dikenal didunia Internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara ini, terutama masalah kemiskinan kronis.

Program ini kemudian didirikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. PKH dijamin sebagai pelaksanaan dari (Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial), (*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.pdf*, 2009), (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Kemiskinan), (Peraturan Kementerian Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018

Tentang Program Keluarga Harapan). PKH merupakan program kesejahteraan sosial yang di rancang dari pemerintah guna menurunkan jumlah kemiskinan yang banyak di Indonesia atau juga menjadi program yang bisa memberantas kemiskinan yang bersinergis dan sebagai Program perlindungan dan pemberdayaan sosial Nasional.

Selain itu, Program Keluarga Harapan memberikan manfaat jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang (Wumu, 2007). Dalam jangka pendek, diharapkan dapat membantu keluarga miskin mengurangi beban pengeluaran. Jangka menengah, diharapkan bisa menciptakan perubahan perilaku peserta dalam bidang kesehatan dan pendidikan sehingga menghasilkan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Sedangkan untuk jangka panjang, program ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Sasaran program keluarga harapan adalah keluarga miskin dan rentan yang terdaftar sebagai orang tidak mampu serta yang sudah terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (*Pedoman PKH Tahun 2021*, n.d.). Program Keluarga Harapan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat, melalui akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, serta pengurangan beban-beban biaya, dengan meningkatkan pendapatan orang miskin dan keluarga rentan dan dengan menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga mendapat manfaat dalam akses ke layanan kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Program PKH ini pasti memiliki dampak yang dirasakan oleh penerimanya hal tersebut membuat banyak kajian-kajian terdahulu yang meneliti terkait Dampak Program Keluarga Harapan seperti kajian dari (Nurma Mustika Hasna, Nurhadji Nugraha, 2019) yang membahas tentang analisis dampak pemberian bantuan PKH terhadap kesejahteraan masyarakat, lalu ada kajian dari (Plangiten, 2021) yang membahas terkait dampak pelaksanaan dari PKH terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Beringin Kota Manado, lalu ada kajian dari (Sari, Sulistyowati, & Prihantika, 2020) yang membahas tentang dampak sosial ekonomi pada KPM PKH, dan ada kajian dari (Dehani, Hernawan, & Purnamasari, 2018) yang membahas terkait Evaluasi PKH di Kecamatan Bogor. Walaupun sama-sama membahas tentang Dampak Program Keluarga Harapan namun terdapat perbedaan dari Fokus penelitian, lokasi penelitian dan hasil penelitiannya.

Di Kecamatan Karimun itu sendiri Program Keluarga Harapan ini dilakukan pada tahun 2012 di Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM) dengan total peserta 658 orang dan tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 2.383 KPM. Sedangkan untuk tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 3.903 KPM. Program Keluarga Harapan ini di salurkan ke 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Karimun. Salah satunya yaitu Kecamatan Ungar.

Kecamatan Ungar merupakan pemekaran dari Kecamatan Kundur yang dimana Kecamatan Ungar memiliki 1 Kelurahan yaitu Kelurahan Alai dan memiliki 3 desa yaitu Desa Batu Limau, Desa Sungai Buluh dan Desa Pulau Ngal yang persebaran penduduk dan luas wilayahnya yang bervariasi. Jumlah penduduk di Kecamatan Ungar

sebanyak 5.855 jiwa sedangkan jumlah rumah tangganya sebanyak 2.021 Kartu Keluarga dengan total penduduk miskin sebesar 279 Jiwa dan Jumlah penerima PKH sebanyak 171 KPM PKH. Dengan adanya Program Keluarga Harapan, keluarga yang mendapatkan bantuan PKH merasa terbantu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka walaupun di Kecamatan Ungar masih ada masyarakat yang kurang mampu dan layak untuk mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Dari penjelasan diatas diperoleh, jumlah penduduk, kemiskinan dan jumlah penerima PKH mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2018-2020, bisa di lihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH di Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun Tahun 2018-2021

Tahun	Jumlah Keluarga Miskin	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH
2018	217 KK	139 KK
2019	227 KK	158 KK
2020	271 KK	113 KK
2021	279 KK	171 KK

Sumber: Olahan peneliti tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ungar pada tahun 2018-2021 mengalami kenaikan dari segi jumlah penduduk, jumlah kemiskinan juga mengalami kenaikan dan jumlah penerima manfaat PKH di Kec. Ungar mengalami kenaikan dan penurunan. Oleh karena itu, bisa diartikan masih ada masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan PKH di Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun diakibatkan oleh data yang tidak akurat karena masih ada masyarakat yang mampu mendapatkan bantuan PKH ini sehingga muncul permasalahan ini.

Untuk menangani masalah PKH ini ditujukan kepada Menteri Sosial karena Menteri Sosial yang membuat kebijakan terkait Bantuan PKH dan berwenang terhadap Program Keluarga Harapan. Bisa dilihat dalam (Kementerian Sosial RI, 2018) pasal 31 yang berbunyi “pelaksanaan PKH wilayah dilakukan oleh Dinas Sosial wilyah provinsi/kota yang menyelenggarakan program bansos bagi keluarga harapan”. Artinya Kemensos telah menetapkan PKH ini kemudian menyerahkannya kepada Dinas Sosial Kabupaten dalam pelaksanaannya sehingga dari Dinsos Karimun menyerahkan lagi tanggungjawab pelaksanaannya ke Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Ungar.

Permasalahan yang muncul di Kecamatan Ungar dalam Program Keluarga Harapan ini di akibatkan adanya data base tidak akurat atau adanya ketidaktepatan sasaran karena tidak semua Keluarga Sangat Miskin mendapatkan bantuan PKH, atau bisa dikatakan keluarga yang layak menerima bantuan PKH ternyata tidak menerima bahkan sebaliknya keluarga yang tidak layak malah menerima bantuan PKH, selain itu permasalahan terkait pencairan yang terkadang mengalami keterlambat dari pusat. Serta Permasalahan lainnya terkait 5 anak yang putus sekolah karena tidak mampu

membayai kebutuhan sekolah, dan tentang pendampingan yang di berikan oleh pendamping PKH yang tidak teratur atau tidak dijalankan dengan maksimal sehingga para Keluarga Penerima Manfaat PKH tidak merasakan manfaat PKH itu untuk apa hanya sebatas mendapatkan bantuan berupa uang tunai atau Program Keluarga Harapan PKH tidak merasakan dampak PKH itu selain dari segi memenuhi kebutuhan. Dengan adanya program keluarga harapan di Kecamatan Ungar, terdapat rencana untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial bagi kelompok masyarakat miskin. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak ekonomi program keluarga harapan di Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak ekonomi dan faktor penghambat dari Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun. Penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut (Anggito, & Setiawan, 2018) penelitian kualitatif adalah pengumpulan data yang pada suatu latar alamiah dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi ketika peneliti adalah sebagai instrument kunci. Sedangkan penelitian deskriptif menurut (Hermawan, 2019) adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan suatu kegiatan dari penelitian yang dilakukan pada objek-objek tertentu secara sistematis dan jelas. Lokasi penelitian ini terletak di Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun. Sedangkan Fokus penelitian ini lebih kepada dampak ekonomi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun sehingga teori penelitian ini menggunakan lima dimensi dampak kebijakan dari Thomas R. Dye (Winarno, 2014:327-330). Adapun jenis data yang digunakan peneliti adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun informan pada penelitian ini berjumlah 17 orang. Meliputi 10 KPM PKH, 1 Koordinator PKH Kabupaten Karimun, 1 Pendamping PKH Kecamatan Ungar, 1 RT, 1 Kesos Kec. Ungar, 1 Sekcam Ungar, 1 mahasiswa pejuang muda, dan 1 masyarakat bukan penerima PKH.

Hasil dan Pembahasan

Peneliti telah mengambil objek penelitian mengenai dampak ekonomi Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan. Sasaran PKH ini ialah masyarakat miskin di Kecamatan Ungar. Lokasi penelitian terletak di Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun dan perjalanan ke lokasinya dapat ditempuh melalui kendaraan darat dan laut (bot). Kecamatan Ungar adalah salah satu kecamatan dari dua belas Kecamatan yang dibentuk di Kabupaten Karimun. Kecamatan Ungar dulunya merupakan bagian dari wilayah administrasi Kecamatan Kunder. Kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan UU Nomor 53 Tahun 1999 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999. Dahulu Kabupaten Karimun terdiri dari tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Kunder, Karimun, dan

Moro. Kemudian dibagi menjadi 12 Kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Ungar. Jumlah penduduk di Kecamatan Ungar sebanyak 5.855 jiwa sedangkan jumlah rumah tangganya sebanyak 2.021 Kartu Keluarga dengan total penduduk miskin sebesar 279 Jiwa. Melihat jumlah penduduk miskin yang banyak di Kecamatan Ungar membuat pemerintah menyalurkan bantuan sosial yang di sebut dengan bantuan Program Keluarga Harapan.

Program Keluarga Harapan ialah Program Bantuan sosial bersyarat yang dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Sosial RI No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Sasaran dari Program Keluarga Harapan ini adalah keluarga miskin atau rentan. Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ungar berjalan sejak tahun 2012 hingga sekarang artinya sudah 10 tahun lamanya PKH ini terlaksanakan. Dengan lamanya program PKH ini pasti terdapat manfaat atau dampak yang dirasakan oleh penerima PKH dari program ini. Dari hasil wawancara terkait Program Keluarga Harapan dapat disimpulkan bahwa PKH di Kecamatan Ungar masih belum dikatakan tepat sasaran lantaran masih ada masyarakat miskin yang belum memperoleh bantuan tersebut bisa dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2 Data Penerima PKH dan Penduduk Miskin di Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun

No	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah KPM PKH	Jumlah KPM Miskin
1.	Kelurahan Alai	76	105
2.	Desa Batu Limau	18	98
3.	Desa Sungai Buluh	54	29
4.	Desa Ngal	23	47
	TOTAL	171	279

Dari data di atas jelas bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) belum cukup berdampak signifikan terhadap Penanggulangan kemiskinan hal tersebut terbukti dengan jumlah penerima PKH dengan jumlah kemiskinan di Kecamatan Ungar yang tidak sebanding. Namun tidak dipungkiri dengan adanya Program PKH ini bisa mengurangi sebagian dari jumlah kemiskinan dan berdampak positif dalam membantu perekonomian Penerima PKH dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Pernyataan ini didukung oleh hasil analisis deskripsi yang ditunjukkan pada hasil penelitian peneliti dengan informan maka dampak ekonomi program keluarga harapan di Kecamatan Ungar merujuk dari teori Thomas R. Dye dalam (Winarno, 2014) berfokus pada 5 dimensi dampak yakni:

1. Dampak yang diharapkan atau tidak diharapkan dari Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun

Program Keluarga Harapan merupakan keinginan besar bagi masyarakat di

Kecamatan Ungar, lantaran menolong meringankan perekonomian bagi Keluarga Penerima Manfaat. Keinginan inilah yang memunculkan suatu dampak dari program/kebijakan yang diharapkan atau tidak di harapkan dari masyarakat. Masyarakat berharap agar program ini sikron dengan sasaran yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 terkait Program Keluarga Harapan. Masyarakat juga berharap agar pemerintah melihat dengan teliti saat mendata masyarakat miskin yang pantas mendapatkannya, menimbang ada Keluarga Miskin yang belum berkesempatan menerima bantuan tersebut. Adapun Program Keluarga Harapan ini diharapkan bisa menaikkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian mereka.

2. **Dampak yang bersifat positif dan negatif**

Dampak ini lebih memberikan dampak yang akan di peroleh dari Program Keluarga Harapan ini bersifat positif maupun negatif. Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ungar berdampak positif. Dampak positif yang ditimbulkan dari PKH ini ialah meringankan beban pengeluaran, dan dapat membantu keluarga yang menjadi peserta PKH untuk membiayai anak sekolah bahkan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu dampak positif yang dirasakan ialah meningkatkan partisipasi pemeriksaan kesehatan anak balita dan kesejahteraan sosial untuk memastikan pemberian asupan gizi untuk lansia dan disabilitas. Selain itu juga PKH ini juga berdampak positif dalam perubahan sebelum dan sesudah dari Keluarga Penerima PKH terbukti ada 5 anak yang putus sekolah sebelumnya lalu dengan adanya bantuan PKH ini mereka bisa melanjutkan sekolahnya, lalu ada 2 KPM PKH yang mengundurkan diri dari PKH karena sudah merasa mampu, dan ada 10 KPM PKH yang membuka usaha dari hasil bantuan PKH ini artinya terdapat perubahan yang dirasakan oleh penerima PKH. Namun PKH ini juga berdampak negatif yaitu ketika Keluarga Penerima Manfaat PKH tidak menggunakan uang bantuan dengan semestinya dan terjadinya ketergantungan bantuan sosial artinya penerima hanya bergantung dengan bantuan yang ada. Dampak negatif lainnya ialah kecemburuan sosial yang dirasakan oleh masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan kepada keluarga penerima bantuan. Serta mengalami keterlambatan dana yang masuk ke ATM penerima PKH.

3. **Dampak masa sekarang dan masa yang akan datang**

Kebijakan/program mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan di masa yang akan datang yang akan berpengaruh pada kelompok sasaran maupun di luar sasaran. Dampak kebijakan pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan di masa yang akan datang atau disebut dengan dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak kebijakan Program Keluarga Harapan memiliki dampak jangka panjang dan jangka pendek. Program Keluarga Harapan ini mempunyai dampak jangka pendek yang dirasakan oleh KPM PKH yaitu meringankan beban mereka dalam memenuhi perekonomian kehidupan

mereka walaupun tidak begitu banyak namun KPM bersyukur mereka juga tetap bekerja untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Sedangkan untuk dampak jangka panjang PKH tidak memberikan jangka panjang karena ada masa atau batas dalam mendapatkan bantuan tersebut. Namun jika Program Keluarga Harapan ini berjalan sesuai yang sudah ditetapkan atau sudah tepat sasaran dampak jangka panjang yang dirasakan ialah berkurangnya angka kemiskinan di Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun.

4. Dampak terhadap biaya langsung

Dampak kebijakan terhadap biaya langsung (*direct costs*) yang dikeluarkan untuk membiayai kebijakan/program tersebut. Dampak kebijakan terhadap biaya langsung. PKH ini ialah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah memenuhi syarat kepesertaan. Hasil penelitian mengatakan bahwa ada dampak biaya yang dirasakan oleh penerima PKH yaitu berupa uang tunai 3 bulan sekali sesuai komponen yang mereka dapatkan yang mereka dapatkan dari Program PKH ini. Uang dari bantuan PKH ini digunakan memenuhi kebutuhan mereka sesuai komponen yang mereka dapatkan.

5. Dampak terhadap biaya tidak langsung

Menyangkut biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat maupun beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik. Biaya-biaya seperti itu seringkali tidak dipertimbangkan dalam membuat evaluasi-evaluasi kebijakan. Hasil penelitian ini ialah dampak tidak langsung dari PKH ini ialah tidak ada dampak yang dirasakan kecuali KPM PKH harus melakukan kewajibannya sebagai penerima PKH sesuai komponen yang mereka dapatkan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa Dampak Ekonomi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun telah memberikan dampak positif kepada Keluarga Penerima Manfaat baik dari segi membantu perekonomian serta meringankan beban dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terbukti dengan adanya perubahan sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan PKH seperti anak yang putus sekolah lalu dengan adanya bantuan PKH ini bisa melanjutkan pendidikannya, lalu KPM PKH yang mengundurkan diri dari PKH karena sudah merasa mampu, dan ada yang membuka usaha dari bantuan PKH, hal tersebut menunjang perekonomian bagi mereka. Selain dampak positif PKH juga berdampak negatif yaitu berdampak pada kecemburuan sosial masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan PKH. Untuk faktor penghambat dari Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ungar ialah terkait keterlambatan pencairan dana bantuan PKH dari pusat. Lalu faktor fasilitas yang minim untuk KPM bisa mandiri seperti membuka usaha bersama sebagai KPM PKH.

Bibliografi

- Anggito, & Setiawan, J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif (Ella Deffi Lestari, Ed.). Jawa Barat: CV Jejak.
- Handayo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Pertama. ed. Widya Karya. Semarang.
- Hermawan, I. (2019). Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, &

- Mixed Methode (Pertama; Hidayatul Gumn Kuningan, Ed.). Kuningan.
- Suratmo, Gunarwan. 2004. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. ed. Gadjia Mada University Press. Yogyakarta.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus) (Cetakan Ke; 2014, Ed.)*. Yogyakarta.

Pustaka yang berupa disertasi/thesis/skripsi:

- Dehani, M., Hernawan, D., & Purnamasari, I. (2018). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor Evaluation Of Keluarga Harapan Program (PKH) In South Bogor District of Bogor City. 4(April), 45–56.
- Nurma Mustika Hasna, Nurhadji Nugraha, I. D. M. (2019). Analisis dampak pemberian bantuan program keluarga harapan (pkh) terhadap kesejahteraan masyarakat.
- langiten, N. N. (2021). Dampak Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang Kota Manado. VII(101), 40–47.
- Sari, A. O., Sulistyowati, R., & Prihantika, I. (2020). Dampak Sosial Ekonomi pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Exit Mandiri dalam Perspektif The Most Significant Change Technique (MSCT). 2.
- Wumu, C. P. (2007). Dampak Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara.

Pustaka yang berupa peraturan-peraturan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1), (2) dan ayat (4)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembar Negara Republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4456).
- Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 31/KEP/MENKO/KESRA/IX Tentang Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2007
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. (2009).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. 2018.
- Pedoman PKH Tahun 2021. (n.d.).